



# Disdik Harus lebih Teliti Menyisir Penerima KJP dan KJMU

**K**OMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar lebih teliti dalam menyisir data penerima bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU).

Soalnya, banyak masyarakat kurang mampu yang terhapus dari data penerima bantuan KJP atau pun KJMU dengan berbagai alasan.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, mereka sebetulnya sangat membutuhkan bantuan itu untuk melanjutkan pendidikan.

Bansos bisa digunakan untuk membeli kebutuhan penunjang sekolah, makanan bergizi, hingga transportasi menuju sekolah.

"Jadi kalau Disdik dapat bantuan dari Pemda, jangan dikurangkan. Sekarang kan gitu, yang rumahnya berdaya listrik kWh 1.300 ke atas enggak dapat KJP dan KJMU," kata Iman pada Minggu (11/8/2024).

Selain itu, Iman juga mengimbau agar Dinas Pendidikan tidak mengubah besaran dana yang diterima pemilik KJP ataupun KJMU.

Apalagi dalam anggaran

perubahan, belanja bansos untuk dua kategori itu bertambah sebesar Rp 382 miliar, rinciannya KJP bertambah Rp 138,4 miliar, dan KJMU bertambah sebesar Rp 356 miliar.

"Ke depannya jangan sampai dicari-cari lagi alasan. Menurut saya, kalau kita sudah memberikan bantuan kepada siswa. Harusnya keputusan itu tetap kita jalankan secara konsisten. Misalnya kalau tahun ini kita kasih Rp 400.000 per orang, ya terus aja kasih segitu," ucap Iman.

Diketahui besaran dana yang diterima peserta didik pemilik KJP berbeda setiap jenjangnya, untuk SD Negeri Rp 250.000 per bulan, sedangkan SD Swasta Rp 250.000 per bulan ditambah SPP Rp 130.000 per bulan.

SMP Negeri Rp 300.000 per bulan, sedangkan SMP Swasta Rp 300.000 per bulan ditambah SPP Rp 170.000 per bulan.

SMA Negeri atau Madrasah Alawiyah Rp 420.000 per bulan, sedangkan SMA Swasta Rp 300.000 per bulan ditambah SPP Rp 290.000 per bulan.

SMK Negeri Rp 450.000 per bulan, sedangkan SMK Swasta Rp 300.000 per bulan ditambah SPP Rp 240.000 per bulan, lalu besaran penerima KJMU yakni Rp 9 juta per semester. (faf)



Dok DPRD DKI